



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2019

Rabu, 22 September 2021
Edisi : 0022 G 447 / GBR / IX / 2021

KLIPING

Berita Pertanian



BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Jl. Harsono RM. No 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Telp. (021) 7806 131 Ext. 2303, 2308, Email : humas-ip@pertanian.go.id
Website : www.pertanian.go.id

GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

RABU, 22 SEPTEMBER 2021

I. BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :

1. HORTIKULTURA :
 - Sumber Garap Varietas Ijo (BI)..... 1
2. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN :
 - RI-Belgia Perkuat Kerja Sama Peningkatan Produksi Daging (ID)..... 2
 - Indonesia-Belgia Perkuat Kerja Sama Peternakan (SI)..... 3
 - Sudah Sepekan Harga Telur masih Anjlok (MI)..... 4
 - Kemendag Siapkan Subsidi Jagung (R)..... 5-6
3. PERKEBUNAN :
 - Sawit Milik PTPN V Raib Harga Premium (ID)..... 7
 - CPO Bakal Terus Berkibar (BI)..... 8-9
 - PTPN III Patok 2025 Swasembada Gula (RM)..... 10-11
4. PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN :
 - Sarana Pertanian & Wisata Dikebut (BI)..... 12-13
5. PERTANIAN UMUM :
 - Pemanfaatan Nuklir RI untuk Pangan Dihargai IAEA (MI)..... 14
 - Peleburan Lembaga Riset ke BRIN Disoal (K)..... 15-16

00000000 O 00000000

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☒ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 22/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

| PRODUKSI BAWANG MERAH |

Sumbar Garap Varietas Ijo

Bisnis, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengembangkan komoditas bawang merah varietas batu ijo karena dinilai produksinya lebih tinggi dibandingkan dengan varietas lokal.

Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan daerah pertama yang menjadi percontohan adalah Desa atau Nagari Pandai Sikek seluas 10 hektare.

"Ini merupakan arahan dari Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian Balitbangtan Kementan RI," katanya Nagari Pandai Sikek, Selasa (21/9). *Bi. 7*

Menurutnya produksi bawang merah varietas batu ijo terbilang berhasil. Sehingga ke depannya pengembangan bisa dilakukan. Hasil panen mencapai 18 ton per hektare atau jauh lebih tinggi dari varietas lokal yang hanya 12—13 ton per hektare sehingga bisa membantu meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, masa panen juga hanya butuh 70 hari.

Sebanyak 70% masyarakat Tanah Datar berprofesi sebagai petani. Beberapa tahun terakhir fokus pada tiga komoditas yaitu cabai merah, bawang merah, dan jengkol. Namun, daerah tersebut juga memiliki potensi tomat dengan produksi sampai 27.000 ton

yang sedang diupayakan penghilirannya berupa pabrik pengolahan saus tomat.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebut sektor pertanian adalah sektor yang paling potensial dikembangkan. Hal ini dikarenakan komposisi dari masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertanian di daerah itu mencapai 58% dari total penduduk.

"Jika sektor ini berkembang dan petani sejahtera maka semua sektor akan ikut mendapatkan imbas positif. Semua sektor ekonomi akan bergerak semua," katanya. (k56)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 22/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 11 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

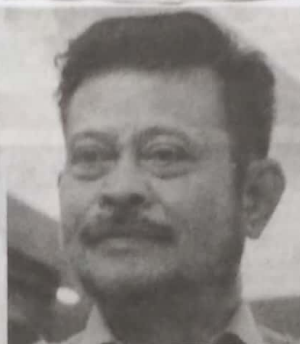
RI-Belgia Perkuat Kerja Sama Peningkatan Produksi Daging

JAKARTA – Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo bersama Menteri Usaha Kecil Wiraswasta SME dan Pertanian Belgia David Clarinval menandatangani Pernyataan Kehendak/*Letter of Intent* (LoI) terkait penguatan kerja sama peternakan di bidang kualitas dan keamanan kesehatan hewan. Belgia menyambut inisiatif Indonesia untuk mengembangkan kerja sama lebih lanjut di antara kedua negara. Sejak 2015, RI dan Belgian Blue Group telah bekerja sama dalam mendorong produksi daging di Indonesia.

Penandatanganan LoI dilakukan di Kantor Pusat Belgian Blue Group di Kota Ciney, Provinsi Namur, Belgia, Senin (20/9). Menteri kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama yang sudah ada dengan kolaborasi lanjutan di bidang peternakan. Kolaborasi tersebut meliputi manajemen pemeliharaan dan standar sanitasi untuk peternakan Belgian Blue di Indonesia. "Kita

harapkan kerja sama ini dapat membantu fasilitasi akses pasar komoditas pertanian, pengembangan kapasitas, kerja sama teknis, dan penelitian bersama antara kedua pihak," kata Menteri Syahrul.

Indonesia menikmati surplus perdagangan dengan Belgia, terutama dari ekspor kopi, karet, tembakau, minyak sawit, kelapa, dan kakao. Belgia juga turut menikmati peningkatan ekspor ke Indonesia pada produk susu, mentega, dan lainnya, seperti kentang dan gandum. "Kita menyambut tren peningkatan perdagangan kedua negara ini," ujar Syahrul yang dalam kunjungan itu turut didampingi Dubes RI untuk Belgia Andri



Syahrul Yasin Limpo

Hadi. Kementerian Pertanian RI memiliki visi mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Kebijakan pertanian tidak hanya menitikberatkan pada transformasi dan penguatan sistem pangan secara lebih holistik dan terintegrasi, tapi tetap berkomitmen terhadap pertanian berkelanjutan yang sesuai kelestarian lingkungan, sosial, dan ekonomi.

David Clarinval menyambut inisiatif Indonesia untuk mengembangkan kerja sama lebih lanjut di antara kedua negara. Sejak 2015, Indonesia dan Belgian Blue Group telah bekerja sama untuk mendorong produksi daging di Indonesia. "Kami siap untuk lebih lanjut melakukan pendampingan di bidang manajemen pemeliharaan, pakan, dan kesehatan ternak Belgian Blue Group di Indonesia," kata David. David juga menyampaikan dukungan penuh penyelesaian perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). Apalagi I-EU CEPA bisa menjadi alat untuk pemulihan ekonomi ataupun pertumbuhan pada

tahun-tahun ke depan.

Pada bagian lain, Indonesia melalui Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN, sebelumnya bernama BATAN) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendapat penghargaan (*outstanding achievement award*) dari Badan Pangan Dunia (FAO) dan Badan Atom Dunia (IAEA). Penghargaan diberikan atas capaian riset dan pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia melalui ORTN di bidang pemuliaan tanaman pangan. Hingga saat ini, ORTN melalui teknologi nuklir telah menghasilkan 32 varietas padi, 12 varietas kedelai, tiga varietas sorgum, satu varietas gandum, satu varietas kacang tanah, dan satu varietas pisang.

Penghargaan disampaikan Dirjen IAEA Rafael Mariano Grossi kepada Duta Besar RI untuk PBB Darmansjah Djumala pada rangkaian persidangan IAEA General Conference ke-65 di Markas PBB Wina, Austria, Senin (20/9). Dubes RI untuk PBB Darmansjah Djumala menyampaikan, Indonesia melalui kiprah para peneliti nuklir bidang pertanian telah menunjukkan kemampuan memanfaatkan teknologi nuklir untuk pengembangan varietas unggul tanaman pangan yang berkontribusi signifikan pada penguatan ketahanan pangan nasional. "Penghargaan ini menunjukkan program penguatan kapasitas SDM teknologi nuklir yang dirintis IAEA bersama FAO telah bermanfaat nyata pada penguatan kapasitas SDM peneliti Indonesia, termasuk aplikasi nuklir di bidang pangan," ujar dia. (dho)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 22/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Indonesia-Belgia Perkuat Kerja Sama Peternakan

CINEY – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo bersama Menteri Usaha Kecil, Wiraswasta, SME dan Pertanian Belgia David Clarinval menandatangani pernyataan kehendak atau *letter of intent* (LoI) untuk penguatan kerjasama peternakan di bidang kualitas dan keamanan kesehatan hewan, di kantor pusat Belgian Blue Group di Kota Ciney, Provinsi Namur, Belgia, Senin (20/9), waktu setempat.

Dalam keterangan tertulis menteri kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama yang sudah ada dengan kolaborasi lanjutan di bidang peternakan. Kolaborasi tersebut meliputi manajemen pemeliharaan dan standar sanitasi untuk peternakan Belgian Blue di

Indonesia. "Kami harap kerja sama ini dapat memfasilitasi akses pasar komoditas pertanian, pengembangan kapasitas, kerjasama teknis, dan penelitian bersama antara kedua pihak," ungkap Syahrul.

Dia menyebutkan, Indonesia menikmati surplus perdagangan dengan Belgia, terutama dari ekspor kopi, karet, tembakau, minyak kelapa sawit, kelapa, dan kakao. Belgia juga turut menikmati peningkatan ekspor ke Indonesia pada produk susu, mentega, dan lainnya seperti kentang dan gandum. "Kita menyambut tren peningkatan perdagangan di antara kedua negara ini," ungkap Syahrul yang dalam kunjungan ini turut didampingi Dubes RI untuk Belgia Andri Hadi.

Lebih lanjut Syahrul menjelaskan Kementerian Pertanian (Kementan) RI memiliki visi mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Kebijakan pertanian tidak hanya menitikberatkan pada transformasi dan penguatan sistem pangan secara lebih holistik dan terintegrasi, tapi tetap berkomitmen terhadap pertanian berkelanjutan, yang sesuai dengan kelestarian lingkungan, sosial, dan ekonomi.

David menyambut positif inisiatif Indonesia untuk mengembangkan kerja sama lebih lanjut di antara kedua negara. Sejak 2015, Indonesia dan Belgian Blue Group telah bekerja sama untuk mendongkrak produksi daging di Indonesia.

■ sudarsono 51.9

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☒ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 22/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Sudah Sepekan Harga Telur masih Anjlok

HARGA telur ayam di tingkat peternak ayam petelur mengalami penurunan drastis. Anjloknya harga telur merugikan peternak ayam petelur lantaran biaya operasional pada pakan yang justru masih cukup tinggi.

"Awalnya masih Rp20 ribu per kilogram enam bulan lalu dan berangsur turun menjadi Rp15 ribu per kilogram sepekan lalu. Sampai sekarang harga bertahan dan tidak pernah ada kenaikan," kata Guntur Bayu, peternak ayam petelur di Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, kemarin.

Ia menambahkan anjloknya harga telur diperparah dengan kondisi persaingan pasar dan masuknya pasokan telur ayam dari Jawa Timur dengan harga di bawah dari harga peternak telur di Kudus.

"Selain itu, harga pakan ayam di pabrikan saat ini cukup tinggi. Harga pakan Rp335.000 per 50 kg untuk 500 ayam sehari," tambahnya.

Turunnya harga telur ayam dan melonjaknya harga pakan ayam membebani peternak ayam di Kudus. Jika dibandingkan dengan lima bulan lalu, harga pakan ayam di pabrikan masih sekitar Rp305.000 per 50 kg. **M-9**

Harga telur juga turun di Banyumas sudah sepekan ini. Imel, pedagang sembako di Kompleks Pasar Wage Purwokerto, menyebutkan sebelumnya ia menjual telur dengan harga Rp24 ribu per kilogram, kini ia jual Rp18 ribu

per kilogram.

"Pasokan telur banyak, tapi daya beli masyarakat sepertinya menurun. Belakangan kurang laku dan banyak juga yang sampe busuk," ungkapnya.

Selain telur, harga cabai juga anjlok. Panen raya cabai petani di Kabupaten Karanganyar dimainkan oleh spekulasi. Bupati Juliyatmono langsung mengerahkan ribuan ASN untuk memborong dengan harga di atas pasar.

"Jangan mainkan harga dan mengambil keuntungan di luar batas yang mengakibatkan petani tercekik. Kasihan petani yang juga berjuang mencari hidup," tegas Juliyatmono dalam kegiatan Gerakan ASN Beli Cabai Petani di halaman Kantor Setda Karanganyar, kemarin.

Menurut dia, Pemkab Karanganyar siap mengintervensi harga panen raya yang anjlok dengan cara mengerahkan 11.000 ASN untuk menolong petani agar tidak merugi dan menjadi sejahtera.

Pada masa panen raya, harga cabai ditawarkan oleh spekulasi berkisar Rp4.000-Rp5.000 per kilogram, sedangkan di pasar harganya masih bisa menyentuh Rp15 ribu/kg. Bupati Juliyatmono pun meminta ASN membantu menaikkan harga cabai untuk mencegah spekulasi merusak harga cabai di tingkat petani dengan cara memborong cabai. (JA/WJ/TS/N-1)

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 22/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Kemendag Siapkan Subsidi Jagung

Rata-rata harga jagung pakan mulai mengalami penurunan.

■ DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) siap memberikan subsidi harga jagung sebanyak 30 ribu ton untuk membantu para peternak unggas demi kebutuhan pakan. Subsidi tersebut diberikan untuk penanganan jangka pendek akibat tingginya harga jagung untuk pakan unggas.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan, rata-rata harga jagung paling tinggi saat ini mencapai Rp 6.100 per kilogram (kg). Harga itu jauh melampaui dari acuan pemerintah sebesar Rp 4.500 per kg untuk kadar air 14 persen.

"Kita siap subsidi, saya tanggung jawab di mana pun barangnya, mau lokal dan impor. Ini untuk kebutuhan bulan ini dulu karena kita harus realistis untuk menyiapkan ke depan," kata Lutfi dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa (21/9).

Lutfi mengatakan, jika rata-rata harga jagung yang perlu disubsidi sebesar Rp 1.500 per kg, kebutuhan dana diperkirakan sekira Rp 45 miliar. Lutfi menegaskan, dana tersebut telah ada menggunakan alokasi ang-

garan program Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP) sebesar Rp 1,5 triliun.

Ia menjelaskan, kenaikan harga jagung saat ini telah diperkirakan sejak Maret lalu. Pihaknya mengaku telah membuat surat resmi kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar menyiapkan langkah antisipasi terhadap sejumlah komoditas bahan pokok yang sensitif, termasuk jagung.

Dia mengatakan, komoditas jagung memiliki pengaturan tata niaga khusus, salah satunya jika ingin melakukan importasi, harus melalui persetujuan Kementerian Pertanian. Berbeda dengan komoditas kedelai yang juga mengalami lonjakan harga, tetapi pasokan tetap tersedia karena importasi dibebaskan.

"Jagung itu tata niaganya diatur, tidak bisa sembarangan diimpor. Ini mesti dipikirkan," tutur Lutfi.

Menurutnya, kenaikan harga jagung saat ini cenderung diakibatkan faktor penawaran dan permintaan. Dia mengatakan, jika pasokan tersedia dengan cukup, harga tidak mungkin melonjak seperti saat ini. Lutfi mengatakan, kebutuhan jagung se-

besar 7.000 ton per bulan di Blitar, Jawa Timur, sempat tidak terpenuhi.

"Sekarang kita jangan berbicara jutaan ton, 7.000 ton saja tidak ada untuk Blitar satu bulan. Saya sudah cek. Jadi, intinya kita siap kasih subsidi, tinggal tunjukkan di mana barangnya," ujarnya.

Kementerian Pertanian (Kemantan) yang bertanggung jawab terhadap penyediaan pasokan komoditas pangan mengklaim ketersediaan jagung hingga akhir pekan kedua September mencapai 2,3 juta ton.

Stok tersebut tersebar di Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) sebanyak 722 ribu ton, di pengepul 744 ribu ton, di agen 423 ribu ton, serta sisanya 411 ribu ton ada di usaha lain, eceran dan di rumah tangga.

Lutfi mengatakan, saat ini diperlukan langkah yang cepat untuk menyelamatkan peternak ayam. Hal ini karena peternak terimbit di antara masalah harga telur ayam yang turun akibat daya beli dan harga pakan unggas yang melonjak.

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi menjelaskan, memang terdapat disparitas harga jagung di pasar dari acuan yang ditetapkan pemerintah. Meski begitu, dia menekankan, ketersediaan dalam negeri masih cukup.

"Permasalahan utama adalah ba-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 22/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

gaimana agar persoalan antara pengusaha pakan, baik besar maupun kecil, bisa disinkronkan terhadap peternak-peternak rumahan yang memang dalam hal ini sangat dirugikan," kata Harvick.

Harvick menyatakan, stok jagung dalam negeri pada dasarnya cukup, termasuk untuk kebutuhan pakan ternak unggas.

Namun, saat ini tengah terjadi persoalan distribusi yang tidak merata sehingga menyebabkan kenaikan harga di beberapa daerah dan memberikan dampak besar bagi peternak.

Sementara itu, harga jagung pakan disebut mulai mengalami penurunan usai Presiden Joko Widodo turun tangan menangani keluhan para peternak ayam petelur pada pekan lalu. Penurunan harga yang terjadi dinilai akibat dampak psikologis pasar.

Presiden Forum Peternak Layan Nasional (PLN) Ki Musbar Mesdi mengatakan, rata-rata harga jagung pakan mulai mengalami penurunan hingga di bawah Rp 5.500 per kg. Menurut dia, proses penurunan tersebut akan terus berlanjut meskipun stok jagung belum dimobilisasi secara massal kepada para peternak.

"Ini dampak psikologis dari perintah presiden," kata Musbar.

■ ed: ahmad fikri noor

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 22/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 11 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Sawit Milik PTPN V Raih Harga Premium

PEKANBARU-PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) mampu meraup Rp 168,80 miliar dari premi penjualan minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) dan minyak kernel (*palm kernel oil/PKO*). Harga premium diraih PTPN V karena perkebunan sawit BUMN tersebut mengantongi dua sertifikasi internasional sekaligus, yakni International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) serta Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Senior Executive Vice President PTPN V Rurianto mengatakan, anak usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atau PTPN Group tersebut merupakan perusahaan perkebunan milik negara pertama yang mengantongi sertifikasi standar Eropa ISCC sejak 2018 silam. Saat ini, 70% unit pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun PTPN V telah mengantongi sertifikasi berstandar Uni Eropa (UE) tersebut. "Begitu

kita juga telah memiliki RSPO yang mencapai 75% dari seluruh unit," kata dia. Baik ISCC maupun RSPO memberikan keuntungan berupa harga premium untuk produk sawit PTPN V. Sejak 2019, perusahaan mendapat keuntungan harga premium mencapai Rp 168,80 miliar atau rata-rata Rp 61 miliar per tahun.

Ruri mengatakan, saat ini delapan dari 12 PKS serta 10 unit kebun PTPN V telah mengantongi sertifikasi ISCC, yakni Tandun, Rokan, Lubuk Dalam, Terantam, Tanjung Medan, Sungai Pagar, Intan, dan Tapung. Sementara empat PKS dan unit kebun lainnya diperkirakan segera mengantongi sertifikasi yang mampu memberikan kontribusi tambahan harga US\$ 10-15 per ton CPO itu pada 2023. "Tahun depan kita akan kembali melakukan proses sertifikasi. *Insyallah* 2023 seluruhnya rampung dan 100% tersertifikasi ISCC," ujar dia di Pekanbaru, Selasa (21/9). (tl/ant) 10-1

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 22/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 3 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

MORATORIUM SAWIT BERAKHIR

CPO BAKAL TERUS BERKIBAR

Bisnis, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia optimistis stabilitas pasokan dan harga minyak kelapa sawit tidak terganggu, menyusul berakhirnya moratorium pembukaan lahan komoditas itu.

Ilm Fathimah Timorria & Hendra Wibawa
redaksi@bisnis.com

Sejauh ini, pemerintah belum memberi kepastian soal nasib moratorium sawit yang resmi berakhir pada 19 September 2021.

Wakil Ketua Umum III Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan produksi minyak sawit masih menunjukkan kenaikan sejak moratorium digulirkan pada 2018. Selama masa berlaku moratorium, pemerintah tidak mengeluarkan izin baru perkebunan sawit.

"Tanpa moratorium, sawit bisa *expand* karena masih banyak izin usaha perkebunan yang belum dikelola. Sejak moratorium pun produksi terus naik sampai sekarang, dan kalau PSR [peremajaan sawit rakyat] berhasil, akan naik lebih tinggi," katanya, Selasa (21/9). 81.3

Terkait dengan harga CPO di pasar global, Togar menyatakan tidak akan lepas dari pengaruh harga minyak nabati lain seperti minyak kedelai atau minyak biji rapa.

Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono juga menyebutkan potensi naiknya pasokan minyak nabati global dan risiko koreksi harga setelah berakhirnya moratorium sawit adalah hal yang wajar dan bersifat sementara.

Menurut dia, permintaan minyak nabati dunia cenderung mengalami kenaikan yang berkisar 5 juta ton per tahun. "Inilah yang akan diperebutkan masing-masing minyak nabati."

Untuk itu, Gapki tetap fokus pada upaya peningkatan produktivitas, yang salah

satunya dengan mendukung pemerintah mempercepat peremajaan sawit rakyat. Selain itu, pelaku usaha berkomitmen untuk taat pada aturan, termasuk mematuhi wajib sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagaimana berlaku saat ini.

Dalam kesempatan lain, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Bernard Riedo menyatakan pelaku industri siap mendorong penghiliran produk sawit guna mengantisipasi potensi produktivitas minyak sawit yang bertambah jika moratorium tidak diperpanjang.

Dia menduga kuat kelanjutan atau berakhirnya moratorium bakal banyak dipengaruhi oleh aspek lingkungan meski produksi minyak sawit nasional tetap bisa optimal sekalipun tidak ada izin baru pembukaan kebun sawit.

Laju pertumbuhan produksi, lanjutnya, bisa lebih cepat jika moratorium tidak diperpanjang. Namun industri sudah siap menampung produksi untuk diproses menjadi produk turunannya.

Dalam kaitan itu, Kepala Ekonom PT Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro menjelaskan bahwa moratorium izin perkebunan sawit yang berakhir pada 19 September 2021 menjadi perhatian dunia.

Selama 3 tahun berlakunya Instruksi Presiden (Inpres) 8/2018, penghentian pemberian izin baru untuk konsesi kelapa sawit telah membuat produksi minyak sawit stabil.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 22/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 3/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Dia menilai moratorium yang tidak diperpanjang akan berdampak terhadap perekonomian mengingat kontribusi komoditas tersebut ekspor nonmigas merupakan salah satu yang terbesar.

Sebagai eksportir minyak sawit terbesar di dunia, izin pembukaan perkebunan yang kembali diberikan bisa menjadi sinyal bahwa Indonesia siap menggelontorkan lebih banyak minyak nabati ke pasar.

Menurut Putera, hal tersebut dapat memicu koreksi harga CPO yang telah melonjak lebih dari 50% dalam setahun terakhir, padahal kenaikan harga CPO telah menopang neraca perdagangan dan rupiah di tengah kekhawatiran efek *tapering*.

Di sisi lain, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kemendag Kasan Muhri menyebutkan momentum *commodity supercycle* yang memicu harga tinggi CPO dioptimasi dengan penghiliran minyak sawit. Normalisasi harga komoditas diyakini berdampak minim pada ekspor minyak sawit.

"Saat ini ketika ada limpahan *revenue* yang dinikmati oleh eksportir sawit maka ada tambahan sumber daya yang dapat dialokasikan untuk melakukan penghiliran dan membangun basis produksi produk-produk yang bernilai tambah tinggi," ujarnya.

Data sementara Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekspor minyak nabati pada kode HS 15 mencapai US\$20,64 miliar selama kurun Januari-Agustus 2021, naik 70,14% dibandingkan dengan periode yang sama setahun sebelumnya.

Minyak sawit menjadi kontributor terbesar terhadap ekspor nonmigas dengan sumbangan 15,39%.

Data Kemendag juga memperlihatkan bahwa ekspor produk minyak sawit telah didominasi oleh produk hilir. *Refined bleached deodorized (RBD) palm oil* menyumbang sekitar 67% dari total ekspor, sementara CPO atau minyak mentah hanya 8%.

"Sehingga ke depan pergerakan harga CPO tidak terlalu memengaruhi kinerja ekspor secara agregat," kata Kasan.

JANGAN BIARKAN SAWIT TERBELIT

Berakhirnya moratorium sawit dikhawatirkan berdampak luas. Misalnya ada kegalauan bahwa kebijakan tersebut bakal menekan harga CPO seiring dengan mengemukanya sentimen izin perluasan perkebunan sawit akan kembali dikeluarkan. Alhasil, pasokan CPO bakal bertambah. Moratorium sawit paling tidak telah membuat produksi minyak stabil.

Perkembangan Ekspor Sawit (Kode HS 15)

Keterangan:
*) Hingga Juli 2021
Sumber: BPS

Tahun	Volume (Juta ton)	Nilai (US\$ miliar)
2018	32,35	20,34
2019	33,03	17,63
2020	30,57	20,71
2021*	16,62	16,59

Luas Area Kebun Sawit Indonesia (juta ha)

Status	Luas	%
Perkebunan Besar Swasta	7,89	55,09
Perkebunan Rakyat	5,81	40,62
Perkebunan Besar Negara	0,61	4,29

BISNIS/HUSIN PARAPAT

2019

Luas	%
7,94	54,42
6,04	41,35
0,62	4,23

Produksi Minyak Sawit Indonesia (juta ton)



KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 22/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 10 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pjok/Karikatur |

Dirikan Sugar Company

PTPN III Patok 2025 Swasembada Gula

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III mendirikan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Company (SugarCo). Kehadirannya diyakini memuluskan target swasembada gula konsumsi pada 2025.

DIREKTUR Utama PTPN III Muhammad Abdul Ghani mengatakan, pihaknya akan menggabungkan 35 Pabrik Gula (PG) dari tujuh PTPN Group menjadi milik SugarCo, yang telah didirikan pada 17 Agustus 2021 sebagai entitas tunggal (*single entity*). Adapun tujuh anak usaha itu meliputi PTPN II, PTPN VII (PT BCAN), PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII (PT IGG), dan PTPN XIV.

Abdul Ghani menjelaskan, tujuan dibentuknya SugarCo antara lain untuk memenuhi gula konsumsi, mengurangi impor gula, dan menghemat devisa negara.

"Termasuk di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas harga gula ritel," ujar Abdul Ghani dalam Rapat Dengar Pendapat

(RDP) dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Senin (20/9).

Ghani mengaku prihatin melihat produksi gula di Indonesia saat ini. Kondisinya berbanding terbalik dengan masa hampir 100 tahun lalu. Pada tahun 1930, Indonesia mampu memproduksi gula mencapai 15 juta ton dalam setahun. Bahkan, Indonesia pernah menduduki posisi kedua sebagai eksportir gula terbesar di dunia, setelah Kuba. RM

Kini, Indonesia justru menjadi importir gula terbesar di dunia. Diharapkannya, pendirian SugarCo mampu memenuhi kebu-

tuhan gula konsumsi masyarakat, yang saat ini masih bergantung dengan produk gula impor.

"Tebu secara rata-rata nasional 15 (juta) ton, sekarang tinggal 5 (juta) ton. Kami yakin, melalui SugarCo mampu meningkatkan kembali produksi gula nasional," katanya.

Ia menilai, swasembada Gula Kristal Putih (GKP) konsumsi tidak bisa dicapai tanpa memperkuat kemitraan dengan petani. Untuk itu, pihaknya akan menggendong petani dalam menaikkan produksi gula nasional.

Apalagi dalam situasi saat ini, Sisa Hasil Usaha (SHU) petani tebu tercatat hanya berkisar Rp 3,7 juta per hektar per tahun. Jauh lebih rendah dibandingkan SHU petani padi yang mencapai

Rp 11 juta per hektar per tahun.

"Selama perkebunan PTPN tidak bisa menaikkan pendapatan petani di atas Rp 11 juta (SHU pertanian padi), jangan harap petani mau menanam tebu. Semua upaya sia-sia karena makin banyak yang beralih ke tanaman lain yang lebih menguntungkan," ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya menargetkan tahun 2024, petani mitra setidaknya bisa mencapai SHU sebesar Rp 21,2 juta per hektar per tahun. Lebih jauh, nilai tersebut diharapkan bisa menyentuh angka Rp 36,5 juta pada 2030.

Selain itu, pihaknya juga berkomitmen menyediakan varietas bibit tebu unggul bersertifikasi pada tahap awal.

"Target mengejar produksi gula dari sekitar 800.000 ton pada 2020 menjadi 2,6 juta ton pada 2030 bisa tercapai," katanya.

Sampai Juni 2021, perusahaan melaporkan produktivitas tebu mencapai 73,3 ton per hektar (ha), naik 107,01 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara produksi gula berjumlah 270.000 ton atau naik 128,57 persen secara tahunan. Pembentukan SugarCo juga salah satu upaya perseroan dalam proses restrukturisasi dan divestasi bisnis gula PTPN Group.

Ghani menegaskan, divestasi hanya dilakukan terhadap pabrik

gula, bukan mencakup lahan tebu. Oleh karena itu, investor tetap bekerja sama dengan PTPN selaku pemilik hak guna lahan dalam menanam dan mengelola tebu.

"SGN nanti memperoleh inbreng dari 35 pabrik gula, (artinya) 51 persen saham dimiliki PTPN, setelah itu baru divestasi (saham) 49 persen," akunya.

Pihaknya pun akan menerapkan sejumlah syarat bagi investor yang hendak divestasi, seperti mempunyai pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dalam menjalankan bisnis gula secara keseluruhan.

"Investor juga harus menyediakan modal untuk revitalisasi dan pembangunan pabrik baru,

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 22/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

maupun operasional perusahaan," ungkapnya.

Ia mengakui, kehadiran investor ini dibutuhkan karena perusahaan sudah tidak bisa lagi melakukan investasi dengan pinjaman dana dari perbankan dalam rangka program restrukturisasi yang sedang dijalankan.

Padahal, perlu dilakukan pembangunan setidaknya lima pabrik gula dan revitalisasi satu pabrik dengan kebutuhan pendanaan tak kurang dari Rp 23 triliun.

Menanggapi ini, Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Budi Hidayat menaruh harapan besar terhadap SugarCo dalam mewujudkan swasembada gula.

"Ini menjadi tantangan bagi BUMN, khususnya perkebunan yang selama ini mengelola pabrik gula dan turut berkontribusi pada produksi gula nasional," ujar Budi saat dihubungi *Rakyat Merdeka*.

Ia berharap, PTPN Group bisa menggaet investor untuk masuk ke industri gula melalui program-program yang akan dikerjakan SugarCo. Apalagi, kehadiran investor dibutuhkan untuk ikut merevitalisasi pabrik-pabrik gula yang sudah tua.

"Kita lihat pabrik gula banyak yang perlu direvitalisasi. Nah, program yang ditawarkan SugarCo harus jelas, apalagi sekarang sedang pandemi. Jadi, investor pun berpikir keuntungan apa yang akan mereka dapatkan," bebernya.

Ia menegaskan, dalam mencapai swasembada pangan tak hanya berkaitan dengan pabrik gula saja. Pasalnya, bila pabrik sudah direvitalisasi, bahkan mampu membangun pabrik gula baru, tetap harus ada jaminan ketersediaan bahan baku.

"Misal pabriknya sudah oke, tapi nggak ada bahan bakunya, kan jadi masalah juga. Ini juga harus jadi perhatian," *warning*-nya.

Sebagai gambaran, Kementerian Pertanian memperkirakan luas area panen tebu untuk pabrik BUMN adalah 199.930 hektare (ha), sementara luas swasta adalah 244.902 ha. Karenanya, perluasan lahan area untuk menanam tebu juga dilakukan untuk meningkatkan volume produksi pabrik gula.

"Untuk bisa swasembada gula, PTPN lewat SugarCo ini harus bisa memenuhi kebutuhan gula konsumsi dalam negeri dulu, yang 2 juta ton itu, baru kita bisa ekspor seperti era kejayaan dulu," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir meminta holding Perkebunan Nusantara ikut mewujudkan swasembada gula konsumsi bagi Indonesia.

"Dengan luas seluruh lahan yang dikelola Holding Perkebunan, Indonesia harus menjadi negara dengan kekuatan industri gula yang solid," katanya, melalui siaran pers, Minggu (18/9). ■ IMA

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 22/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

SARANA PERTANIAN & WISATA DIKEBUT

Bisnis, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memacu pembangunan infrastruktur fasilitas pendukung untuk meningkatkan produksi pertanian serta menciptakan daya tarik wisata.

redaksi@bisnis.com

Bendung Lalengrie di Desa Ujung Lamuru Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone yang dibangun sejak 2019 telah memasuki tahap II dengan progres pengerjaan 85%.

Plt. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyatakan pembangunan Bendung Lalengrie melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) ini, dibagi dalam dua tahapan pengerjaan.

Pengerjaan proyek tahap pertama berupa pekerjaan bendung dan jaringannya senilai Rp21,5 miliar telah rampung 100%.

"Sementara untuk pembangunan tahap kedua, berupa pekerjaan *reservoir* dan jaringannya dengan anggaran Rp41,9 miliar, progresnya 85%," ujarnya, Senin (20/9).

Sudirman menjelaskan bahwa Bendung Lalengrie Bone memperlihatkan kemajuan dan aspek fungsional sesuai rencana. Jika pembangunan tahap kedua rampung, pemanfaatan Bendung Lalengrie bisa segera dinikmati oleh masyarakat.

Oleh karena itu, dia meminta kepada seluruh pihak serta masyarakat setempat untuk mendukung penyelesaian bendungan tersebut.

Berdasarkan data Pemprov Sulsel, areal bendung Lalengrie direncanakan dapat mengairi lahan pertanian seluas 1.100 hektare

(ha), tetapi untuk pengerjaan tahap pertama dan kedua baru bisa mengairi 700 ha.

"Itu karena masih ada pekerjaan lanjutan untuk menghubungkan daerah irigasi pada bagian bawah. Rencananya, pembangunan Bendung ini dilanjutkan pada tahun 2022 untuk perampungan *reservoir* dan kolam isap," ungkapnya.

Sudirman menambahkan, kerja sama semua pihak akan mempercepat penyelesaian pembangunan bendung Lalengrie sehingga dapat menjadi aset Provinsi untuk irigasi teknis bagi masyarakat sekitar.

Bendung tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena merupakan investasi Pemerintah Provinsi Sulsel yang langsung dinikmati manfaatnya oleh masyarakat untuk irigasi pertanian yang bisa meningkatkan produksi hasil pertanian.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Mohammad Ramadhan Pomanto meminta agar pulau-pulau yang memiliki potensi menjadi destinasi wisata untuk dikembangkan.

Sedikitnya ada 12 pulau yang memiliki potensi tersebut sehingga perlu dilakukan pembenahan mulai dari infrastruktur dan sejumlah fasilitas lainnya untuk menunjang daya tarik wisatawan yang akan berkunjung.

"Untuk daya pikatnya memang ada beberapa pembenahan yang harus dilakukan seperti air bersih, listrik, sekolah, dan akses kesehatan," ujar Wali Kota yang akrab disapa Danny Pomanto tersebut.

Dia meminta dukungan oleh dari semua pihak terkait untuk mendorong pengembangan wisata kepulauan di Makassar. Keindahan pulau-pulau yang mengelilingi Kota Makassar tidak kalah dengan wisata pulau yang ada di beberapa daerah lainnya.

Beberapa pulau di Makassar kini menjadi primadona destinasi wisata pulau yang dikunjungi banyak wisatawan. Menurut Danny, pengembangan wisata pulau ini juga diyakini bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat.

"Pengembangan wisata pulau yakin akan berjalan jika semua pihak berkontribusi."

Keinginan Danny Pomanto sejalan dengan rencana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang akan membuka kembali 18 destinasi pariwisata prioritas, menyusul mulai melandainya kurva pandemi di Tanah Air.

Pada tahun ini, Makassar, Selayar dan Toraja merupakan tiga dari destinasi pariwisata prioritas baru yang ditambahkan.

Selain itu ada beberapa destinasi di daerah lain seperti Tanjung

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Takaruf Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ ASK/Kulturb | ☐ Kelahanan Pangan |
| ☐ Kesehatan dan Kesejahteraan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ ASK/Perikanan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Kesehatan dan Sains Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agre Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 22/3/2021 |
| ☒ Berita Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 / 1 |
| ☐ INDOPOS | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investasi Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnas Nasional | ☐ Palita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ KOSRAT | ☐ Rugubika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Cunung-Sungai Liat, Cikidang-Pelabuhan Ratu, Pangadaran, Jetu-Kaluar, Manado, dan Raja Ampat. Serta satu destinasi pariwisata prioritas revitalisasi yakni Provinsi Kalimantan.

INFORMASI TEKNOLOGI

Dalam perkembangan lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah membangun infrastruktur backbone Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan nilai investasi Rp15 miliar yang ditargetkan rampung pada 2023.

Kepala Bidang Infrastruktur TIK, Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim, Arif Lukman Hakim menjelaskan backbone TIK ini dibangun untuk mengintegrasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim yang ada di wilayah Surabaya Raya.

"Tahap pertama, pembangunan infrastruktur TIK sudah selesai dengan backbone yang menghubungkan 14 OPD, yakni dari Dinas Kesehatan di ujung utara, lalu tersambung ke OPD di sekitar wilayah Injoko, serta Dinas Peternakan hingga ke Dinas Tenaga Kerja," jelasnya, Selasa (21/9).

Dia menjelaskan pada tahap pertama pembangunan infrastruktur TIK tersebut sudah menelan anggaran sekitar Rp2,2 miliar. Untuk kelanjutan proyek ini dibutuhkan anggaran sekitar

“

Pengembangan wisata pulau yakin akan berjalan jika semua pihak berkontribusi.

Rp2,1 miliar.

"Tapi kalau mau diselesaikan dengan cepat tahun depan, maka anggaran yang dibutuhkan langsung Rp12 miliar dan ini akan kita ajukan untuk tahun depan," imbuhnya.

Arif mengatakan tahap pembangunan selanjutnya yang akan dilakukan yakni di Arah selatan mulai dari kantor BPBD, Inspektorat, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kehutanan, hingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim.

Aplikasi tersebut berfungsi untuk mengetahui penggunaan bandwidth secara real time di setiap OPD selama 24 jam nonstop. Dengan begitu, besarnya penggunaan bandwidth di setiap OPD dapat termonitor, baik secara harian maupun puncak pemakaian. (K36/

Peni Wildarti) ■

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 22/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 13/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Pemanfaatan Nuklir RI untuk Pangan Dihargai IAEA

INDONESIA melalui Organisasi Riset Tenaga Nuklir (sebelumnya bernama BATAN) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendapat penghargaan atau *outstanding achievement award* dari Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) dan Badan Atom Dunia (International Atomic Energy Agency/IAEA).

Penghargaan disampaikan Dirjen IAEA, Rafael Mariano Grossi, kepada Duta Besar RI untuk PBB, Darmansjah Djumala, pada rangkaian persidangan IAEA General Conference ke-65 di Markas PBB Wina, Austria, Senin (20/9) waktu setempat.

Penghargaan tersebut diberikan atas capaian riset dan pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia melalui Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) di bidang pemuliaan tanaman pangan. Hingga saat ini, ORTN melalui teknologi nuklir telah menghasilkan 32 varietas padi, 12 varietas kedelai, 3 varietas sorgum, 1 varietas gandum, 1 varietas kacang tanah, dan 1 varietas pisang.

Dirjen IAEA mengatakan perubahan iklim yang melanda dunia saat ini menjadi tantangan bagi para peneliti untuk mengembangkan varietas tanaman unggul. "Dunia saat ini dihadapkan pada tantangan serius, yaitu perubahan iklim dan ancaman terha-

dap ketahanan pangan," kata Rafael dalam keterangan resmi BRIN, Selasa (21/9).

Dirjen FAO, Qu Dongyu, mengatakan penghargaan itu merupakan kontribusi nyata teknologi nuklir terhadap ketahanan pangan global. FAO dan IAEA akan terus mendukung peningkatan kapasitas para peneliti bidang pangan dalam rangka mendukung keberlanjutan riset mutasi radiasi.

Dubes RI untuk PBB Darmansjah Djumala menyampaikan bahwa Indonesia melalui kiprah para peneliti nuklir bidang pertanian, selama ini telah menunjukkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi nuklir untuk pengembangan varietas unggul tanaman pangan. Hal itu berkontribusi signifikan pada penguatan ketahanan pangan nasional.

Menurut Darmansjah, penghargaan itu menunjukkan bahwa Indonesia diakui dalam penguasaan teknologi nuklir untuk tujuan damai dan menerapkannya untuk mendukung program pembangunan nasional. Hasil Kerja sama internasional dengan negara anggota IAEA yang telah dicapai merupakan cerminan diplomasi membumi pemerintah Indonesia dalam bidang teknologi nuklir yang mampu memberikan manfaat sosial ekonomi langsung kepada masyarakat melalui aplikasi dalam bidang pangan. (Van/H-1) M1.13

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 22/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 8/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Peleburan Lembaga Riset ke BRIN Disoal

Sejumlah pihak menyoal istilah "terintegrasi" pada UU Sisnas Iptek yang diimplementasikan sebagai peleburan sejumlah lembaga riset ke BRIN.

JAKARTA, KOMPAS — Peleburan lembaga penelitian dan pengembangan menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional dinilai tidak tepat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menjadi dasar peleburan tersebut kini digugat sejumlah peneliti. Gugatan itu terutama pada istilah *terintegrasi* yang termuat di Pasal 48 Ayat (1).

Gugatan tersebut diajukan oleh peneliti dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Eko Noer Kristiyanto dan anggota Dewan Riset Daerah DKI Jakarta Heru Susetyo. Permohonan uji materi tersebut telah didaftarkan dengan nomor perkara 46/PUU-XIX/2021. Namun, pada 17 September 2021, Eko Noer mengundurkan diri sebagai penggugat. **K. 8**

Wasis Susetio, kuasa hukum pada kasus ini, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/9/2021), mengatakan, Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) pada dasarnya sudah baik. Namun, khusus pada Pasal 48 Ayat 1 terutama pada istilah *integrasi* dinilai menjadi persoalan.

"Istilah tersebut kemudian diterjemahkan melalui peraturan presiden sebagai pembubaran yang kemudian menjadi dasar peleburan lembaga-lembaga

penelitian dan pengembangan menjadi BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional," katanya.

Adapun gugatan yang diajukan untuk menguji istilah *terintegrasi* yang antara lain terdapat di Pasal 48 Ayat 1 UU No 11/2019. Pasal 48 Ayat 1 berbunyi, "Untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional."

Menurut Wasis, istilah *terintegrasi* tersebut menimbulkan *multitafsir*. Istilah tersebut kemudian dimaknai dengan pembubaran lembaga penelitian dan pengembangan yang kemudian dilebur menjadi BRIN. Padahal, integrasi tersebut bisa juga dimaknai untuk mengkoordinasikan kekuatan dan spesifikasi dari setiap lembaga yang sudah ada.

Peleburan dari lembaga riset serta lembaga penelitian dan pengembangan tersebut menimbulkan keresahan para peneliti dan periset. Dikhawatirkan, kondisi saat ini justru menjadi kemunduran bagi pengembangan iptek di Tanah Air. Kerja sama di lembaga riset sebelumnya bisa terganggu.

"BRIN menjadi organisasi birokrasi yang *superbody*. Sistem birokrasi yang berjalan pun bisa lebih rumit," ucap Wasis.

Kuasa hukum penggugat,

Zainal Arifin Husein, menambahkan, pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menguji istilah *integrasi* bukan sebagai peleburan. BRIN seharusnya bertindak sebagai badan koordinasi, bukan sebagai institusi baru yang menyebabkan lembaga riset sebelumnya dilebur, termasuk 48 lembaga penelitian dan pengembangan yang sebelumnya berada di bawah kementerian.

Koordinasi ini dilakukan bukan terkait riset dan inovasi, melainkan seperti penyusunan perencanaan, program, anggaran, serta sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan.

"Seharusnya ini dimaknai dengan adanya semacam kementerian koordinator terkait riset dan teknologi, bukan justru penyatuan seluruh lembaga. UU No 11/2019 seharusnya menjadi landasan konstitusional untuk menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bagian penting dalam pengembangan Indonesia," kata Zainal.

Soal transparansi

Peneliti Ahli Utama Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Maxensius Sambodo, menyatakan, pro-kontra muncul, juga karena pembentukan BRIN di-

nilai tidak transparan. Peneliti tidak dilibatkan dari awal sehingga terkesan menimbulkan pemaksaan kehendak politik.

"Para peneliti belum sadar mau ke mana, tiba-tiba sudah harus berubah. Jika memang ada kekurangan, sebaiknya diperbaiki karena sebetulnya saat ini sudah berjalan baik. Seluruh proses yang dijalankan pun harus lebih terbuka dan transparan," tuturnya.

Ranah eksekutif

Secara terpisah, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan, uji materi yang diajukan terkait UU Sisnas Iptek merupakan hak warga negara. Menurut dia, integrasi unit penelitian dan pengembangan di tingkat kementerian dan lembaga ke BRIN merupakan amanat dari UU No 11/2019. Sementara, mekanisme dan strategi integrasi dari unit litbang tersebut menjadi ranah eksekutif dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dalam upaya percepatan penyelesaian masalah riset di Indonesia.

"BRIN adalah badan yang memiliki kewenangan kebijak-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 22/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 8 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

an dan sekaligus pelaksana teknis. Itu sebabnya, BRIN bukan LPNK (lembaga penelitian non-kementerian), meski juga bukan kementerian. Keuntungan dari status badan adalah sifatnya lebih permanen daripada kementerian yang mengikuti siklus kabinet setiap lima tahun," katanya.

Menurut Handoko, penyatuan kewenangan kementerian dalam kebijakan serta badan sebagai pelaksana teknis sebenarnya diperlukan untuk sektor riset. Itu karena tidak banyak regulasi yang diperlukan di sektor riset.

"Riset secara global sifatnya *self regulated*, pengaturan lebih oleh komunitas sains terkait. Karena itu, untuk mengatur aktivitas riset, kementerian tidak akan bisa berbuat banyak seperti selama ini karena hanya memiliki instrumen anggaran. Sebaliknya, badan memiliki instrumen SDM dan infrastruktur selain anggaran sehingga lebih efektif," tuturnya.

Handoko menilai, kekhawatiran peneliti saat ini sebenarnya bukan karena harus bergabung ke dalam BRIN. "Kekhawatiran mereka adalah apabila tidak diperkenankan mutasi ke BRIN oleh kementerian/lembaga asal sehingga terpaksa harus alih jabatan dan tidak bisa melanjutkan karier sebagai peneliti," paparnya. (TAN)

2